

**ANALISIS DISPARITAS SPASIAL
DAN ALIRAN INVESTASI DI DAERAH RIAU
(The Analysis of The Spatial Disparity and Investment Flows
in The Riau Province)**

Almasdi Syahza¹

Pusat Pengkajian Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
(PPKPEM)

Universitas Riau

E-mail: asyahza@yahoo.co.id atau syahza@telkom.net

Website: <http://almasdi.unri.ac.id>

A B S T R A K

Pembangunan ekonomi bertujuan memacu pertumbuhan dengan memperhatikan aspek pemerataan. Sektor industri dijadikan sebagai motor penggerak pembangunan dan memacu pertumbuhan ekonomi serta berfungsi sebagai pemerataan, baik antar sektor, antar golongan masyarakat, maupun antar daerah (wilayah). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah sektor industri berhasil sebagai alat untuk menciptakan pemerataan atau ketimpangan. Untuk mengetahui ketimpangan antar wilayah digunakan analisis Indek Williamson. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor industri cenderung memperbesar ketimpangan antar daerah. Jumlah investasi pada setiap daerah tingkat dua, ternyata tidak ada hubungan dengan tingginya pendapatan per kapita masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Kata Kunci : Disparitas Spasial, Investasi

ABSTRACT

The purpose of the economic development is to accelerate growth that is also in line with disparity aspect. The industry sector is considered as a motor of the development and as an accelerator of the economic development and is functioned as the balance, not only among sectors and societies status, but also among cities (areas). This research was aimed to evaluate whether the industry sector was a good indicator and as a mean for creating good income distribution or disparity. To analyze the disparity among cities (areas), this research used Williamson Index. The research findings indicated that the industry sector tended to widen the disparity among cities. Total investment in all regencies was not related with high income per capita of the society in the related cities.

Keys words: Spatial Disparity, Investment

¹ Kepala Pusat Pengkajian Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PPKPEM) Universitas Riau; Pengajar pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Riau.

PENDAHULUAN

Daerah Riau memiliki karakteristik yang khas yakni posisi geografisnya yang strategis serta potensi sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya serta keadaan daerahnya yang terdiri dari banyak pulau dan terpencil. Seperti apa yang diungkapkan oleh Almasdi Syahza (2002a), dengan warna dan corak wilayah yang demikian, bidang usaha yang tumbuh dan berkembang di daerah Riau lebih mengarah pada usaha-usaha yang serskala besar, padat modal, padat iptek dan berorientasi ekspor. Jika dilihat angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio) daerah Riau tahun 1999 sebesar 7,13. Angka ini cukup besar sebagai akibat dari krisis ekonomi tahun sebelumnya. Dari sisi lain angka ini menunjukkan inefisien dalam pelaksanaan produksi di Riau. Pada tahun 2000 angka ICOR turun menjadi 4,06. Namun pada tahun 2001 kembali naik menjadi 6,09 dan ini menunjukkan pertanda tentang ekonomi biaya tinggi.

Pertumbuhan PDRB Riau tahun 2000 cukup baik yakni sebesar 10,25 persen, dan pada tahun 2001 turun menjadi 5,05 persen. Menurut Mudrajad Kuncoro (2002) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan cara-cara atau teknologi produksi itu sendiri. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya dalam pertumbuhan ekonomi adalah pembentukan modal atau pengumpulan modal yang dipandang sebagai salah satu faktor. Menurut Nurkse yang dikemukakan oleh Mudrajad Kuncoro (2000) yaitu ; "Lingkaran setan kemiskinan di negara terbelakang dapat digunting melalui pembentukan modal".

Pertumbuhan ekonomi yang kita pacu selama ini belum mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, seperti masyarakat perkotaan, sedangkan masyarakat pedesaan atau pinggiran mendapat porsi yang kecil dan tertinggal. Masih terjadi kesenjangan (disparitas) terutama antar daerah dan sektor serta antar golongan masyarakat. Kesenjangan antar daerah ini paling menyolok adalah antara daerah pengembangan kawasan industri dengan kawasan pengembangan pertanian. Daerah pengembangan pertanian tersebut mata pencarian pokok masyarakatnya hanya bergantung kepada pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia yaitu, perkebunan, mencari kayu, petani tradisional (subsisten), dan nelayan (Tulus TH. Tambunan, 2001)

Kesenjangan ini akan diperburuk karena adanya kesenjangan dalam pembangunan antar sektor, terutama antara sektor pertanian (basis ekonomi pedesaan) dan nonpertanian (basis ekonomi perkotaan). Kesenjangan ini akan berakibat pada tingkat kesejahteraan berbagai kelompok masyarakat. Jika masalah ini tidak ditangani secara serius, maka kesenjangan antar kota dan pedesaan akan semakin parah, sehingga daerah-daerah tertinggal akan semakin banyak ditemui. Kesenjangan ini cukup berbahaya karena menyimpan potensi konflik kerusuhan dan kecemburuan sosial (Almasdi Syahza, 2002b).

Secara teoritis meningkatnya kesenjangan antar daerah atau antar masyarakat disebabkan oleh banyak faktor, antara lain: kurangnya pendidikan dan keterampilan, tidak memiliki faktor produksi seperti tanah dan modal, tidak adanya akses terhadap permodalan dan pemasaran hasil pertanian. Kekurangan tersebut akan menyebabkan rendahnya kemampuan berproduksi, sehingga akan berakibat rendahnya pendapatan keluarga (Almasdi Syahza, 2003a).

Masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah, apakah sektor industri yang banyak tumbuh di Riau mampu memperkecil disparitas antar wilayah atau memperbesar. Sehubungan dengan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sektor industri dan aliran investasi terhadap disparitas spasial di daerah Riau. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh investasi terhadap disparitas antar wilayah dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan per kapita di daerah Riau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru dengan metode *developmental research*. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat time series (urut waktu). Data diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS), Badan Promosi dan Investasi (BPI) Propinsi Riau selama periode tahun 1994-2001. Pengolahan data dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Perhitungan disparitas spasial. Untuk mengetahui perhitungan disparitas spasial (regional inequality) di antara daerah tingkat dua di Riau digunakan Indek Williamson (Siti Sutriah Nurzaman, 2002).

$$I_w = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - \bar{Y})^2 \frac{f_i}{n}}}{\bar{Y}}$$

Dimana, I_w adalah Indek Williamson; f_i adalah jumlah penduduk di masing-masing daerah tingkat dua; n merupakan jumlah penduduk Riau; Y_i adalah pendapatan per kapita di masing-masing daerah tingkat dua; dan \bar{Y} adalah pendapatan per kapita Riau. Angka indek bergerak dari nol sampai 1 ($0 < I_w < 1$). Indeks Williamson semakin mendekati 1 menunjukkan semakin besar disparitas antar daerah (disparitas spasial).

2. Guna mengetahui penyebaran investasi dilakukan dengan pentabulasian data, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) di masing-masing daerah tingkat dua. Aliran investasi ini dikaitkan dengan pendapatan per kapita di masing-masing daerah tingkat dua.

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Melalui hasil perhitungan ini dapat diketahui bagaimana peran investasi yang tertanam dalam sektor industri dalam mengeliminasi disparitas spasial di daerah Riau. Analisis ketimpangan di daerah Riau selama periode tahun 1994-2001 dilihat dari dua segi yaitu analisis dengan semua sektor dan analisis tanpa sektor industri pengolahan (tanpa perhitungan minyak dan gas).

Perhitungan Disparitas dengan Memasukkan Semua Sektor

Analisis disparitasl spasial menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku yang di dalamnya merupakan akumulasi sumbangan seluruh kegiatan sektor ekonomi di daerah Riau tahun 1994-2001. Besarnya disparitas yang dinyatakan dalam Indek Williamson disajikan pada

Tabel 1. Data dasar yang digunakan ialah pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Dari tabel tersebut terlihat nilai ketimpangan antar daerah tingkat dua di Riau.

Perhitungan dengan memasukkan sektor industri, memperlihatkan nilai ketimpangan cukup besar. Selama periode tahun 1994-1998 nilai ketimpangan hampir mendekati 1, ini menunjukkan ketimpangan berat yang disebabkan karena adanya sektor industri pada daerah tingkat dua terutama Batam, Kepulauan Riau, Bengkalis, dan Pekanbaru.

Berdasarkan angka Indeks Williamson tersebut dapat diberikan interpretasi bahwa hasil pembangunan Daerah Riau yang mengandalkan sektor

industri selama periode tahun 1994-2001 menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah tingkat dua. Akibat ini akan menimbulkan juga ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Masyarakat yang bekerja di sektor industri akan mendapatkan porsi pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang bekerja di luar sektor industri, karena sektor industri mampu memberikan nilai tambah yang tinggi. Pada tahun 1996 dan pasca krisis ekonomi angka indeks Williamson mendekati 1, ini disebabkan karena sektor industri memegang peranan penting dalam perekonomian daerah, terutama kontribusi sektor industri dari Batam. Ini terbukti pada tahun 1998 tingkat pertumbuhan ekonomi Riau -5,4 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi cukup besar (sekitar -13,4 persen per tahun). Tingginya pertumbuhan ekonomi Riau pada masa krisis disebabkan ekonomi Batam yang tumbuh diatas 17 persen per tahun.

Tahun 1994 pendapatan per kapita daerah Riau sebesar Rp 1.764.963,11 dan pada tahun 2001 naik menjadi Rp 5.165.107,62 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 16,58 persen per tahun. Pendapatan per kapita terbesar adalah daerah Batam dan daerah yang pendapatannya terendah adalah daerah Rokan Hulu. Daerah tingkat dua lain yang pendapatannya per kapitanya melebihi rata-rata tingkat propinsi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1 Indeks Williamson Di Daerah Riau
Periode Tahun 1994-2001

Tahun	Dengan Sektor Industri	Tanpa Sektor Industri
1994	0,896204	0,456756
1995	0,934736	0,456958
1996	0,983214	0,466126
1997	0,939391	0,411737
1998	0,953596	0,392845
1999	0,830928	0,283801
2000	0,686623	0,262221
2001	0,621055	0,267441

Sumber: Data olahan

Tabel 2 Daerah Tingkat Dua yang Pendapatan Per Kapitanya Melebihi Tingkat Propinsi dengan Memasukkan Sektor Industri Pengolahan (Tanpa Migas)

Kabupaten/Kota	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
1 Batam	#	#	#	#	#	#	#	#
2 Karimun	#	#	#	#	#	#	#	#
3 Kepulauan Riau	#	#	#	#	#	#	#	#
4 Kampar	~	~	~	~	~	#	~	~
5 Pekanbaru	~	~	~	~	~	~	#	#
6 Pelalawan	~	~	~	~	~	~	~	~
7 Kuantan Singingi	~	~	~	~	~	~	~	~
8 Indragiri Hilir	~	~	~	~	~	~	~	~
9 Indragiri Hulu	~	~	~	~	~	~	~	~
10 Dumai	~	~	~	~	~	~	~	~
11 Natuna	~	~	~	~	~	~	~	~
12 Siak	~	~	~	~	~	~	~	~
13 Rokan Hilir	~	~	~	~	~	~	~	~
14 Bengkalis	~	~	~	~	~	~	~	~
15 Rokan Hulu	~	~	~	~	~	~	~	~

Sumber: Diolah dari data PDRB Riau periode 1994-2001

Pendapatan per kapitanya lebih besar dari pendapatan per kapita tingkat propinsi

~ Pendapatan per kapitanya lebih kecil dari pendapatan per kapita tingkat propinsi

Dari Tabel 2 tampak bahwa dengan memasukkan sektor industri dalam perhitungan sejak tahun 1994-1998 terdapat 3 daerah tingkat dua yang mempunyai pendapatan per kapitanya di atas pendapatan per kapita daerah Riau. Selama periode 1999-2001 menjadi empat daerah tingkat dua. Yang menarik untuk dikaji adalah daerah Kepulauan Riau yang bukan merupakan daerah industri menunjukkan tingkat pendapatan per kapita melebihi pendapatan per kapita Riau. Ini disebabkan karena di daerah ini berkembang sektor jasa (perhotelan). Begitu juga daerah Kampar pada tahun 1999 pendapatan per kapitanya melebihi tingkat propinsi. Perlu diketahui bahwa kabupaten Kampar terpusat pada pengembangan perkebunan kelapa sawit yang produk turunannya (CPO) orientasi ekspor. Pada pasca krisis sektor ini mampu bertahan dan memberikan pendapatan yang tinggi terhadap petani.

Perhitungan Disparitas Tanpa Sektor Industri

Analisis disparitas tanpa sektor industri memperlihatkan ketimpangan tidak begitu berat, justru sejak pasca krisis tahun 1997 menunjukkan angka penurunan sampai pada tahun 2001 (Tabel 1). Tanpa sektor industri menyebabkan ketimpangan antar wilayah semakin kecil. Hal ini disebabkan pasca krisis dapat mendongkrak ekonomi pedesaan. Sejak krisis, ekonomi

pedesaan yang berbasis pertanian menunjukkan kontribusi yang besar terhadap pendapatan per kapita masyarakat.

Seperti halnya hasil perhitungan pada sektor industri, perhitungan Indeks Williamson dengan tidak memasukkan sektor industri periode 1994-1996 (sebelum krisis) menunjukkan kenaikan. Namun sejak masa krisis angka indeks Williamson cenderung menurun. Dari hasil perhitungan pada Tabel 1 menunjukkan ketimpangan yang lebih kecil pada tahun 2001 sebesar 0,267441 tanpa sektor industri dan 0,621055 dengan sektor industri. Tanpa sektor industri ketimpangan antar daerah tingkat dua semakin kecil.

Dari angka yang terdapat pada Tabel 1 dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pembagian pendapatan per kapita pada sektor-sektor di luar industri pengolahan juga menunjukkan adanya perbedaan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun perbedaan lebih kecil apabila dibandingkan dengan perhitungan PDRB dengan memasukkan sektor industri pengolahan.

Beberapa daerah tingkat dua yang pendapatan per kapitanya melebihi pendapatan per kapita Propinsi Riau dari tahun 1994-2001 dapat dilihat dari Tabel 3.

Dari Tabel 3 terlihat daerah tingkat dua yang pendapatan per kapitanya melebihi pendapatan per kapita Propinsi Riau jauh lebih banyak dibandingkan dengan memasukkan sektor industri. Namun empat daerah tingkat dua yakni: Rokan Hilir, Bengkalis, Rokan Hulu, dan Siak masih dibawah pendapatan per kapita propinsi.

Tabel 3 Daerah Tingkat Dua yang Pendapatan Per Kapitanya Melebihi Tingkat Propinsi Tanpa Sektor Industri Pengolahan (Tanpa Migas)

Kabupaten/Kota	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
1 Karimun	#	#	#	#	#	#	#	#
2 Kepulauan Riau	#	#	#	#	#	#	#	#
3 Batam	#	#	#	#	#	#	#	#
4 Indragiri Hilir	~	~	~	~	~	#	#	#
5 Natuna	~	~	~	~	~	#	~	#
6 Kampar	~	~	~	~	~	#	~	~
7 Pekanbaru	#	#	#	#	#	~	#	#
8 Kuantan Singingi	~	~	~	~	~	~	#	#
9 Dumai	#	#	#	#	~	~	#	#
10 Pelalawan	~	~	~	~	~	~	~	#
11 Indragiri Hulu	~	~	~	~	~	~	~	#
12 Rokan Hilir	~	~	~	~	~	~	~	~
13 Bengkalis	~	~	~	~	~	~	~	~
14 Rokan Hulu	~	~	~	~	~	~	~	~
15 Siak	~	~	~	~	~	~	~	~

Sumber: Diolah dari data PDRB Riau periode 1994-2001

Pendapatan per kapitanya lebih besar dari pendapatan per kapita tingkat propinsi

~ Pendapatan per kapitanya lebih kecil dari pendapatan per kapita tingkat propinsi

Dengan membandingkan hasil perhitungan pada Tabel 1 terhadap Tabel 2 dan Tabel 3, dapat ditarik kesimpulan bahwa di satu pihak sektor industri mampu meningkatkan pendapatan penduduk karena pertumbuhannya yang tinggi, tetapi dilain pihak tidak mampu mengeliminasi disparitas spasial di daerah Riau.

Penyebaran Investasi di Riau

Dari segi penanaman investasi yang dilaksanakan, hampir semua daerah tingkat dua memanfaatkan investasi. Tetapi kalau dilihat dari segi dampak ekonominya belum menunjukkan hasil yang diharapkan, hal ini disebabkan karena investasi pada beberapa daerah tingkat dua mempunyai multiplier efek yang kecil kecuali untuk daerah Batam dan Pekanbaru (Almasdi Syahza, 2003b).

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) oleh sektor swasta maupun pemerintah di beberapa daerah tingkat dua disajikan pada Tabel 4 dan 5. Untuk PMDN selama periode 1995-2001 hampir semua daerah tingkat dua memanfaatkan modal tersebut, kecuali Kabupaten Kuantan Singingi tidak mendapatkannya, begitu juga PMA. Sedangkan untuk daerah tingkat dua lainnya memperoleh penanaman modal baik dari PMDN maupun dari PMA.

Pada Tabel 6 dan 7 disajikan urutan daerah tingkat dua yang memperoleh PMDN baik PMA dalam periode anggaran tahun 1995-2001. Bila disilang Tabel 6 dan 7 dengan Tabel 2 dan 3 ternyata tidak ada hubungan antara daerah tingkat dua yang pendapatan per kapita tinggi (baik termasuk sektor industri maupun tanpa sektor industri) dengan jumlah investasi yang besar yang bersumber dari modal dalam negeri dan modal luar negeri di masing-masing daerah bersangkutan. Dari keempat tabel tersebut ternyata Batam, Karimun, Kepulauan Riau bukan penerima investasi tertinggi, tetapi pendapatan perkapitanya melebihi tingkat propinsi.

Ada empat kemungkinan sebab mengapa fenomena ini terjadi. **Pertama**, investasi sektor industri di daerah tingkat dua yang menyebabkan disparitas spasial semakin membesar kemungkinan besar adalah industri milik swasta dengan fasilitas PMA dan PMDN bukan investasi pemerintah. Investasi sektor swasta lebih mengutamakan target keuntungan, sementara investasi pemerintah lebih mengutamakan nilai manfaat untuk masyarakat. Dalam penelitian ini karena keterbatasan data dan waktu, industri milik pemerintah tersebut belum berhasil diungkapkan sebaran geografisnya; **Kedua**, kemungkinan industri dengan fasilitas PMDN dan PMA di masing-masing daerah tingkat dua ada yang tinggi nilainya tetapi menimbulkan *multiplier effect* yang kecil sehingga tidak memperbesar PDRB daerah bersangkutan (seperti sektor pertanian). Sebaliknya investasi swasta dengan fasilitas PMA dan PMDN, walaupun nilainya kecil di suatu daerah tingkat dua tetapi mempunyai *multiplier effect* yang besar sehingga dapat mempertinggi PDRB daerah bersangkutan; **Ketiga**, penanaman investasi pada daerah tingkat dua baik PMDN maupun PMA terfokus pada sektor pertanian yang pengembalian tingkat investasinya dalam jangka waktu yang agak lama; dan **keempat**, kemungkinan investasi yang dilakukan oleh sektor pemerintah baik swasta yang bersumber PMDN dan PMA tertanam pada sektor

sosial yang mempunyai *multiplier effect* yang kecil serta tingkat pengembaliannya yang lambat.

KESIMPULAN

1. Sektor industri mempunyai peluang besar dalam meningkatkan pendapatan per kapita penduduk di Daerah Riau, dilain pihak, sektor industri juga berpeluang untuk memperbesar disparitas spasial. Hal ini terbukti dengan lebih besarnya Indeks Williamson dengan memasukkan sektor industri ke dalam perhitungan.
2. Pembangunan di Daerah Riau yang terjadi selama ini adalah *polarization effect* yang ditandai dengan mengalirnya modal dan tenaga kerja dari daerah yang belum berkembang ke daerah yang telah berkembang sementara *spread effect* serta *striking down effect* yang diharapkan malah tidak terjadi. Akibat yang dirasakan adalah daerah yang sudah berkembang semakin berkembang dan di daerah tersebut akan terjadi penumpukan kegiatan industri, sementara daerah-daerah lain semakin tertinggal dan kurang diminati oleh investor.
3. Secara diskriptif dapat dikatakan bahwa, dalam kurun waktu tujuh tahun (1995-2001) kurang menunjukkan hubungan yang nyata antara wilayah yang memiliki pendapatan per kapita tinggi dengan banyaknya modal dalam negeri dan modal asing yang mengalir ke wilayah tersebut. Hal ini disebabkan antara lain; (a) investasi yang di tanamkan pada masing-masing daerah tingkat dua mempunyai *multiplier effect* yang kecil sehingga tidak memperbesar PDRB daerah bersangkutan; (b) sebaliknya industri swasta dengan fasilitas PMA dan PMDN dengan nilai investasi kecil tetapi mempunyai *multiplier effect* yang besar sehingga dapat mempertinggi PDRB daerah tersebut; (c) investasi pada daerah tingkat dua baik PMDN maupun PMA terfokus pada sektor pertanian yang pengembalian tingkat investasinya dalam jangka waktu yang agak lama.

SARAN

1. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah tingkat dua, oleh sebab itu pembangunan daerah Riau untuk masa yang akan datang bukan hanya terfokus pada pembangunan sektor industri di pusat-pusat pertumbuhan saja, tetapi juga pembangunan sektor ekonomi di pedesaan yang dapat menciptakan nilai tambah yang tinggi.
2. Sektor ekonomi pedesaan dapat ditingkatkan melalui pembangunan sektor industri yang berbasis pedesaan (sektor pertanian), dengan model ini akan dapat merangsang terjadinya pengaliran modal ke pedesaan (*capital inflow*) sehingga *multiplier effect* ekonomi juga terjadi di daerah pedesaan.
3. Pada penelitian ini karena keterbatasan data, industri milik pemerintah belum berhasil diungkapkan sebaran geografisnya. Oleh sebab itu diharapkan bagi peneliti lanjut untuk meneliti tingkat penyebaran industri milik pemerintah maupun milik swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Almasdi Syahza, 2002a, Potensi Pembangunan Industri Hilir Kelapa Sawit di Daerah Riau, dalam *Usahawan Indonesia*, No. 04/TH XXXI April 2002, Lembaga Manajemen FE UI, Jakarta.
- , 2002b, Potensi Pengembangan Desa Tertinggal dan Mobilitas Penduduk di Kabupaten Bengkalis Riau, dalam *Kependudukan*, Vol 4 No 2, Juli 2002, Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Penelitian Unpad, Bandung.
- , 2003a, Potensi Pembangunan Industri Minyak Goreng di Daerah Riau, dalam *Sosiohumaniora*, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran Volume 5 No 1 Maret 2003, Jakarta.
- , 2003b, Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi Di Riau, dalam *Jurnal Indonesia Membangun*, Vol 2 No 1, Maret 2003, STIE INABA, Bandung.
- Mudrajad Kuncoro, 2000, *Ekonomi Pembangunan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- , 2002, *Analisis Spasial dan Regional*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Siti Sutriah Nurzaman, 2002, *Perencanaan Wilayah di Indonesia pada Masa Sekitar Krisis*, ITB, Bandung.
- Tulus T.H. Tambunan, 2001, *Transformasi Ekonomi di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

Tabel 4 Investasi PMDN Menurut Daerah Tingkat Dua di Riau (dalam juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*
1 Kuantan Singingi	-	-	-	-	-	-	-
2 Indragiri Hulu	10.500,00	8.099,02	68.567,14	-	-	77.126,50	672.665,00
3 Indragiri Hilir	-	130,00	58.296,17	263.698,10	-	75.022,00	-
4 Pelalawan	-	-	-	-	-	147.200,00	10.450,00
5 Siak	-	-	-	-	-	324.546,00	-
6 Kampar	2.042.329,95	2.781,43	300.237,88	3.916.179,00	6.748.993,00	5.134.648,00	3.911.388,00
7 Rokan Hulu	-	-	-	-	-	-	-
8 Bengkalis	1.397.272,93	692,32	117.919,08	385.745,00	2.787.313,38	2.363.534,55	199.550,00
9 Rokan Hilir	-	-	0	-	-	-	64.500,00
10 Kepulauan Riau	561.326,75	724,54	45.300,00	125.876,25	175.300,00	239.245,00	32.628,00
11 Karimun	-	-	-	-	-	-	2.500,00
12 Natuna	-	-	-	-	-	-	-
13 Pekanbaru	44.575,00	123,70	22.608,65	138.567,72	76.486,50	87.365,34	9.105,00
14 Batam	124.825,00	5.137,50	-	-	-	-	338.036,00
15 Dumai	-	-	-	161.670,96	-	5.734,00	323.036,00
Jumlah	4.180.829,63	17.688,52	612.928,92	4.991.737,03	9.788.092,88	8.454.421,39	5.563.858,00

Sumber: Badan Promosi dan Invesatsi Propinsi Riau

* Data setelah pemekaran wilayah; Periode 1997-2000 tidak termasuk daerah otorita Batam

Tabel 5 Investasi PMA Menurut Daerah Tingkat Dua di Riau (dalam 000.000 US \$)

Kabupaten/Kota	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001*
1 Kuantan Singingi	-	-	-	-	-	-	-
2 Indragiri Hulu	-	-	-	34,21	4,70	-	0,17
3 Indragiri Hilir	-	-	-	-	-	0,60	-
4 Pelalawan	-	-	-	-	-	-	1,60
5 Siak	-	-	-	-	-	-	0,55
6 Kampar	-	64.826,17	751,81	-	1,21	22,00	5.901,13
7 Rokan Hulu	-	-	-	-	-	-	-
8 Bengkalis	970.971,54	197.141,87	4.547,69	410,88	4.739,59	180,43	217,00
9 Rokan Hilir	-	-	-	-	-	-	-
10 Kepulauan Riau	290.835,00	77.407,50	327,61	611,01	104,32	37,43	40,31
11 Karimun	-	-	-	-	-	-	1,50
12 Natuna	-	-	-	-	-	-	-
13 Pekanbaru	21.950,00	141.760,02	-	322,93	262,90	8,80	20,99
14 Batam	-	-	-	-	32,62	-	990,41
15 Dumai	-	-	-	-	-	-	61,30
Jumlah	1.283.756,54	481.135,56	5.627,11	1.379,03	5.145,34	249,25	7.234,95

Sumber: Badan Promosi dan Invesatsi Propinsi Riau

* Data setelah pemekaran wilayah

Tabel 6 Peringkat Daerah Tingkat Dua yang Memanfaatkan Investasi PMDN

Peringkat	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*
1	Kampar	Indragiri Hulu	Kampar	Kampar	Kampar	Kampar	Kampar
2	Bengkalis	Batam	Bengkalis	Bengkalis	Bengkalis	Bengkalis	Indragiri Hulu
3	Kepulauan Riau	Kampar	Indragiri Hulu	Indragiri Hilir	Kepulauan Riau	Siak	Batam
4	Batam	Kepulauan Riau	Indragiri Hilir	Dumai	Pekanbaru	Kepulauan Riau	Dumai
5	Pekanbaru	Bengkalis	Kepulauan Riau	Pekanbaru		Pelalawan	Bengkalis
6	Indragiri Hulu	Indragiri Hilir	Pekanbaru	Kepulauan Riau		Pekanbaru	Rokan Hilir
7		Pekanbaru				Indragiri Hulu	Kepulauan Riau
8						Indragiri Hilir	Pelalawan
9						Dumai	Pekanbaru
10							Karimun

Sumber: Data Olahan dari Tabel 4

* Data setelah pemekaran wilayah

Tabel 7 Peringkat Daerah Tingkat Dua yang Memanfaatkan Investasi PMA

Peringkat	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*
1	Bengkalis	Bengkalis	Bengkalis	Kepulauan Riau	Bengkalis	Bengkalis	Kampar
2	Kepulauan Riau	Pekanbaru	Kampar	Bengkalis	Pekanbaru	Kepulauan Riau	Batam
3	Pekanbaru	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	Pekanbaru	Kepulauan Riau	Kampar	Bengkalis
4		Kampar		Indragiri Hulu	Batam	Pekanbaru	Dumai
5					Indragiri Hulu	Indragiri Hilir	Kepulauan Riau
6					Kampar		Pekanbaru
7							Pelalawan
8							Karimun
9							Siak
10							Indragiri Hulu

Sumber: Data Olahan dari Tabel 5

* Data setelah pemekaran wilayah